

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIWALAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI AYAM
(Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Jafar Sodik
NPM. 1521030223**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Hiwalah merupakan akad yang timbul karena adanya utang piutang, yang dapat membantu mengatasi permasalahan terkait pembayaran utang. Utang piutang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya utang piutang yang berasal dari jual beli. Masyarakat Desa Serdang yang berprofesi sebagai peternak maupun broker sering melakukan utang piutang dalam jual beli, dan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka sering melakukannya dengan *hiwalah*. *Hiwalah* itu terjadi seperti saat melakukan pembelian ayam dengan sistem DO atau diutang kemudian pembayarannya dialihkan. Namun, terkait utang yang dialihkan terdapat perbedaan jumlah nominalnya dengan piutang, perbedaan itu diketahui dan disepakati pada awal akad dan dianggap sebagai imbalan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Praktik *Hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. 2) apakah *Hiwalah* dalam transaksi Jual Beli Ayam yang terjadi di Desa Serdang di bolehkan dalam Islam.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji praktek *Hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai permasalahan *Hiwalah* dalam transaksi Jual Beli Ayam di Desa Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terhadap *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara atau interview, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan Sistematisasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan oleh beberapa broker dan peternak. *Hiwalah* terjadi pada saat broker atau peternak membeli ayam dengan diutang kemudian pembayaran nya dialihkan. Utang yang timbul akibat jual beli tidak memiliki kesesuaian jumlah nominalnya dengan piutang yang dimiliki sebelumnya. Dalam hukum Islam *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang tidak diperbolehkan. Hal itu karena *hiwalah* tersebut termasuk dalam *hiwalah al-muqayyadah*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Dan apabila antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlahnya maka *hiwalah* tidak sah. Hal tersebut juga dikhawatirkan akan mendekatkan pada transaksi riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jafar Sodiq
NPM : 1521030223
Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019
Penulis,

Jafar Sodiq
Npm. 1521030223



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : **JAFAH SODIQ**

NPM : **1521030223**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIWALAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI AYAM (Studi Kasus
di Desa Serdang Kec.TanjungBintangKab. Lampung
Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Falsal, S.H., M.H.

NIP. 195512251985031002

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi Kasus di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)** disusun oleh **Jafar Sodiq NPM.1521030223**, Program Studi **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Rabu/9 Oktober 2019, di Ruang Sidang II Fakultas Syariah.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

Penguji Utama : **Drs. Mundzir HZ, M.Ag.**

Penguji Pendamping I : **Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

Penguji Pendamping II : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا
أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواة البخاري)¹

“Dari Abi Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (HR. Bukhori)”



¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004). h. 432.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt. atas hidayah-Nya, skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Allah Swt. atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Surajiman, dan Ibunda tersayang Haryatini, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak dapat membanggakan untuk keluarga. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan akhirat.
3. Kakak-kakakku Dina Rahmatika, S.Pd.I dan Amru Baladi yang selalu memberi dukungan kepadaku.
4. Adikku tersayang Dzakiyah Lutfah Al-baroah yang telah menjadi motivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Jafar Sodiq, dilahirkan di Serdang pada tanggal 25 Maret 1996, anak ketiga dari empat saudara, dari pasangan bapak Surajiman dan ibu Haryatini.

Menempuh Pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan taman kanak-kanak (TK) darmawanita lulus pada tahun 2002.
2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Serdang, lulus pada tahun 2008.
3. Pendidikan Madrasah tsanawiyah (MTS) al-muhsin Metro, lulus pada tahun 2011.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan Serdang bidang kejuruan Akuntansi, lulus pada tahun 2015.
5. Pada tahun 2015 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa.

2. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H. selaku dosen pembimbing I dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Tim Penguji Skripsi yaitu Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Ketua Sidang, Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. selaku Penguji Utama, H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Penguji Pendamping II. Muslim, M.H.I. selaku Sekretaris, yang sudah hadir dan memberikan masukan-masukan serta nilai yang memuaskan.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing, serta seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 15 terkhusus Muamalah B yang sudah memberikan motivasi dan kebersamaan.
8. Dini Andriyani, S.H. yang telah memberikan masukan dan bantuan kepadaku, baik terkait penentuan judul seminar hingga penulisan skripsi.

9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya, Amin



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Signifikansi Penelitian	6
G. Metode Penelitian	7
 BAB II KAJIAN TEORI	 14
A. Kajian Teori	14
1. Jual Beli	14
a. Pengertian Jual Beli	14
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
d. Macam-Macam dan Bentuk Jual Beli	21
e. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	27
2. Utang Piutang	29
a. Pengertian Utang Piutang	29
b. Dasar Hukum Utang Piutang	30
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang	31
3. <i>Hiwalah</i>	33
a. Pengertian <i>Hiwalah</i>	33
b. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	36
c. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	37
d. Macam-Macam atau Jenis <i>Hiwalah</i>	44

e. Berakhirnya <i>Hiwalah</i>	45
f. Akibat Hukum <i>Hiwalah</i>	48
g. Beban <i>Muhil</i> setelah <i>Hiwalah</i>	49
h. Unsur Kerelaan dalam <i>Hiwalah</i>	50
B. Kajian Teori	52
BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)	55
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Serdang	55
2. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Serdang	56
3. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Serdang	59
4. Struktur Pemerintahan	60
B. Praktik <i>Hiwalah</i> di Desa Serdang	62
BAB IV ANALISA DATA	74
A. Praktik <i>Hiwalah</i> dalam Transaksi Jual Beli Ayam	74
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Hiwalah</i> dalam Transaksi Jual Beli Ayam	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 1 Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Serdang Kecamatan TanjungBintang	54
Tabel. 2 Jumlah Warga Masyarakat Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang	56
Tabel. 3 JumlahDusun di DesaSerdang	57
Tabel. 4 JumlahPendudukBerdasarkan Mata Pencaharian	57
Tabel. 5 LembagaKemasyarakatanDesa di DesaSerdang.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Turnitin

Lampiran 2. Surat Keterangan Dekan

Lampiran 3. Surat Keterangan Bimbingan

Lampiran 3. Surat Keterangan Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal mendapatkan gambaran yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau salah penafsiran dikalangan pembaca dalam memahami judul skripsi maka perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap arti dan makna istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwalah* dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di tegaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²

Hiwalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

Transaksi merupakan Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.⁴

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁵

Ayam adalah sejenis unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipelihara.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah melakukan Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwalah* yakni mengalihkan utang kepada orang lain dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari untuk memilih judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwalah* Dalam Transaksi Jual Beli Ayam**” ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. **Alasan Objektif**, terjadinya praktik *hiwalah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang, baik *hiwalah* dalam jual beli maupun *hiwalah* pada umunya. Sehingga tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari

³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 107.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.1543.

⁵A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing), h. 104.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 108.

sudut pandang Hukum Islam mengenai *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam.

2. **Alasan Subjektif**, guna mendapat gelar di Fakultas Syari'ah, dan kajian yang berhubungan dengan *Hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam ini belum banyak yang mengkajinya, serta objek kajian juga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.⁷ Manusia hidup di dalam masyarakat dituntut untuk hidup saling tolong menolong, guna mencukupi kebutuhan hidup pribadinya maupun orang sekitarnya. Manusia tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Berbagai cara dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Salah satu cara pintas yang digunakan yaitu berhutang antara satu sama lain. Baik berhutang dalam jual beli maupun berhutang uang untuk membeli.

Hutang piutang merupakan contoh muamalah yang diperbolehkan dalam islam, pada dasarnya hukum hutang piutang adalah sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya,

⁷Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), h. 11.

sehingga hutang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT.⁸

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
(المائدة (٥):٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S al-Maidah (5):2).⁹

Dalam hutang piutang, Islam menganjurkan untuk segera melunasinya. Karena bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar hutang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.¹⁰ Namun, terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam muamalah disebut dengan hiwalah. *Hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.¹¹

⁸A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, h. 123.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85.

¹⁰A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, h. 127.

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 219.

Praktik *hiwalah* yang terjadi di Desa Serdang yaitu *hiwalah* yang dilakukan dalam transaksi jual beli ayam, dimana seorang broker ayam dan pakan ternak di Desa Serdang membeli ayam kepada peternak dengan berhutang, maka hal ini membuat broker memiliki hutang pada peternak. Namun, pembayaran hutang tersebut di *hiwalahkan* kepada orang lain (*muhal 'alaih*) dikarenakan orang tersebut memiliki hutang uang pada broker atau broker memiliki piutang pada orang tersebut. Tetapi dalam hal ini terdapat masalah terkait *hiwalah* yang terjadi, *hiwalah* dalam jual beli ayam pada praktiknya memiliki perbedaan terkait utang dan piutangnya.¹²

Dalam pelaksanaannya, praktik *hiwalah* dikalangan masyarakat Desa Serdang tersebut dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah terkait hutang piutang. Namun, terkadang praktik *hiwalah* digunakan sebagai ajang penagihan hutang yang telah lama tidak terbayar. Hal ini lah yang menjadi faktor alasan mengapa masyarakat melakukan *hiwalah*.¹³

Pembahasan terkait *hiwalah* bukan merupakan hal yang baru dibahas, banyak diketemukan penelitian terkait *hiwalah* tetapi belum ada yang melakukan penelitian *hiwalah* dalam jual beli ayam seperti yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang.

Berdasarkan ulasan di atas perlu diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam guna mendapat suatu penjelasan dari suatu penelitian.

¹² Wawancara Pra Survey dengan Bapak Amat Rohani (Broker Ayam dan Pakan Ternak) pada tanggal 6 Desember 2018.

¹³ Wawancara Pra Survey dengan Bapak Muladiyono (Peternak) pada tanggal 6 Desember 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya:

1. Bagaimana Praktik *Hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang?
2. Apakah *Hiwalah* dalam transaksi Jual Beli Ayam yang terjadi di Desa Serdang di bolehkan dalam Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu, sebagaiberikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *Hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai permasalahan *Hiwalah* dalam transaksi Jual Beli Ayam di Desa Serdang.

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu, antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *hiwalah* dalam transaksi jual beli, serta penelitian ini dianggap bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan *hiwalah* dalam jual beli ayam.

- b. Secara Praktis, guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau misi tertentu.¹⁴ Dalam hal ini, data diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terhadap praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam di Desa Serdang.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian dilakukan langsung pada objeknya, penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran

¹⁴J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2-3.

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

dan bukan angka-angka.¹⁶ Digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam, kemudian dijelaskan pula pandangan hukum Islam terhadap kejadian konteks tersebut.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang, serta penentuan hukum dari praktik *hiwalah* yang terjadi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).¹⁷ Data primer juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data yang utama yaitu masyarakat yang melakukan praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua.

¹⁶*Ibid.*, h. 5.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Diperoleh melalui badan atau instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.¹⁸

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, yang ditulis oleh tokoh lain dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti *muhi, muhal, muhal alaih*. Pada prakteknya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Praktik tersebut akan dilihat dari pandangan hukum Islam.

¹⁸Sedamayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 73.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku lain.²⁰ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²¹

Pengertian lain populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Serdang Kec. Tanjung Bintang yang berprofesi sebagai peternak dan broker, yang berjumlah 42 orang.

²⁰*Ibid.*, h. 85.

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 81.

²²Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 33.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi.²³

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam.

Jumlah masyarakat yang melakukan praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam berjumlah 12 orang, maka sampel yaitu 12 orang masyarakat Desa Serdang Tanjung Bintang yang berprofesi peternak dan broker.

5. Metode Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

²³*Ibid.*

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁴

b. Rekonstruksi Data (*Recontructioning*)

Recontructioning yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

Sistematisasi atau *Systematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik *Hiwalah* dalam Transaksi Jual Beli Ayam.

Setelah data-data terkumpul kemudian akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 115.

²⁵*Ibid.*, h. 29.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Berkaitan dengan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, baik data-data dari lapangan tentang konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.²⁶



²⁶Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 22

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut bahasa berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.¹

Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah:²

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ...

“Mereka mengharapkan Tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S Al-Fatir (35):29).³

Jual Beli menurut istilah terdiri dari beberapa pendapat. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 192.

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing), h. 103.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

- 1) Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu;

- 2) Menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

- 3) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai’* (jual) dan *asy syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.⁴
- 4) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara’* dan disepakati.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Jakarta: Alma’arif, 1997), h. 47.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 85.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة (٢): ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah (2):275).⁷

Ayat di atas secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba, Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Adapun riba itu terbagi atas dua macam, yaitu riba jahiliyah yang disebut *riba nasî'ah* dan *riba fadhl*.⁸

Istilah *nasî'ah* berasal dari kata (نساء) yang berarti menunda menanggihkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014), h. 68-69.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 163.

memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga dalam utang.⁹

Sementara riba *Fadl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahan.¹⁰

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء (٤): ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ (4):29)¹¹

2) Hadis Nabi Saw

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا
تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
(رواه البخاري)¹²

“Dari Ibnu Umar R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak khiyar (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama

⁹ Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern , dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 Juni 2015, h. 652. tersedia di (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articel/view/247>)

¹⁰ *Ibdi.*, h. 651.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65.

¹² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2004), h. 380.

keduanya belum berpisah, sedangkan keduanya berkumpul bersama.” (HR. Bukhori)

3) *Ijma'*

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.¹⁴

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah.”¹⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul, ini yang ditunjukkan oleh saling

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, h. 48.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

tukar menukar atau berupa saling memberi.¹⁶ Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁷

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat: pelakutransaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan barang), akad transaksi (ijab dan qabul).¹⁸

2) Syarat Jual Beli

Selain Rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, dalam jual beli tentu harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad baik penjual maupun pembeli, agar jual beli menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan Syariat.

Syarat-syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi yaitu antara lain:

a) Syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (orang yang melakukan akad),

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Harus berakal yakni *mumayyiz*.

(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 28.

(3) Keduanya tidak mubazir. Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir).

b) Syarat yang berkaitan dengan *maqud alaih* (objek akad). Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(1) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri.

(2) Bersihnya barang atau suci.

(3) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'.

(4) Barang yang dijual harus *mawjud* (ada).

(5) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli..¹⁹

c) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, antara lain sebagai berikut:

(1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.

(2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

(3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

(4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.188-189.

(5) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁰

(6) Menyatunya *majlis* (tempat akad), ijab dan qabul berada pada satu tempat.²¹

d. Macam-Macam dan Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²²

Ditinjau dari segi benda yang diajadian objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda atau barang yang tidak ada, serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Ditinjau dari segi subjek (pelaku akad) jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual:

²⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 110-111.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 70.

²² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

1) Akad jual beli dengan lisan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.²³

2) Akad jual beli dengan perantara.

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan diantara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat* *ijab qabu* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

Menurut Mazhab Hanafi ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian:

²³ Sayyid Sabiq, *Fikkih Sunnah* 12, h. 123.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78.

- 1) Jual beli *sahih*. Pengertian Jual beli *sahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.
- 2) Jual beli *ghair shahih*. Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.²⁵

a) Jual beli bathil

Jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni:

- (1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 201.

(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan dilaut. Bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.²⁶

(3) Jual beli *gharar*, *gharar* menurut bahasa artinya ketidakjelasan atau tipuan, jadi jual beli *gharar* artinya transaksi yang tidak mungkin dapat diserahkan atau mengandung ketidakjelasan (tipuan) dari salah satu pihak.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq. Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).²⁸ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

- (a) Jual beli *muzabanah*.
- (b) Jual beli *mulamasah* dan *munabazah*.
- (c) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- (d) Jual beli *an-Najasy*.²⁹
- (e) Jual beli sperma hewan pejantan.³⁰

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 71-72

²⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 27.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, h. 74.

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 73-77.

(f) Jual beli anak hewan dalam janin (*Habl Al-Hablah*). Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.³¹

(g) Jual beli najis dan benda-benda najis.³²

b) Jual beli *fasid*

Jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak. Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:

- (1) Jual beli *majhul* (tidak jelas barang yang diperjualbelikan).
- (2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.
- (3) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.
- (4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*).
- (5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.

³⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 113.

³¹ *Ibid.*, h. 114.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 77.

(6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.³³

Dilihat dari segi shigatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang sighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.³⁴

Dilihat dari hubungan dan objek jual beli

- 1) Jual Beli *Muqyadhah* (barter) adalah jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 2) Jual Beli *Sharf* adalah Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁵

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian, yaitu:

- 1) Jual beli menguntungkan (*al-murabahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

³³ *Ibid.*, h. 80-83.

³⁴ *Ibid.*, h. 203.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.³⁶

Beberapa jual beli yang masih diperdebatkan:

- 1) Penjualan kredit dengan harga lebih mahal, dibolehkan memberikan tambahan harga pada harga tertunda dari harga kontan, menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama yang ada.
- 2) Jual beli *'inah*, yaitu sejenis jual beli manipulatif agar pinjaman uang dibayar dengan lebih banyak.
- 3) Jual beli *wafa'*, yaitu jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barangnya.
- 4) Jual beli berpanjar (uang muka), yaitu membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia menjadi pembelinya, uang itu dimasukkan dalam harganya. Namun apabila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual.
- 5) Jual beli *istijrar*, yaitu pengambilan kebutuhan dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian baru membayarnya selang beberapa waktu.³⁷

e. *Khiyar* dalam Jual Beli

Makna *khiyar* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membataalkannya).

³⁶ *Ibid.*, h. 101-102.

³⁷ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 141-142.

Fungsi *khiyar* menurut Syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Khiyar Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat, *khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.
- 2) *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual baju ini dengan harga Rp. 100.000.- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.
- 3) *Khiyar 'aib* (cacat), adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.³⁸

³⁸Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 76-78.

2. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang Piutang secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang disebut (دين). Sedangkan secara terminologi utang piutang merupakan istilah untuk suatu harta *hukmi* yang berada dalam tanggungan. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *Qardh* atau *iqradh* yang secara etimologi berarti pinjaman, sedangkan menurut terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama.

Dayn dan *Qardh* pada dasarnya memiliki perbedaan yang terletak pada maknanya. *Dayn* lebih menuju ke makna umum yaitu mencakup ke segala jenis utang, baik utang yang timbul akibat dari suatu akad seperti utang yang terjadi dalam akad jual beli maupun akad sewa yang upahnya diberikan di akhir. *Qardh* memiliki makna yang lebih khusus. *Qardh* merupakan utang yang timbul karena akad pinjaman.

Qardh juga dapat diartikan sebagai menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki.³⁹

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang

³⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 262.

diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁰

b. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة (٢): ٢٤٥)

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah (2):245)⁴¹

Hukum utang piutang pada dasarnya adalah sunnat, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.⁴² Hal ini sebagaimana dengan Firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

(المائدة (٥): ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah (5):2)⁴³

⁴⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 123

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

⁴² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 123

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

b. Ijma'

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ini berdasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain.

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan *mubah* bagi *muqtarid*.

c. **Rukun dan Syarat Utang Piutang**

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat dalam semua bentuk muamalah, salah satunya utang piutang. Agar utang piutang dipandang sah dalam Islam maka harus terdapat rukun dan syarat yang menyertainya. Adapun Rukun dan Syarat utang piutang adalah sebagai berikut:

1) Rukun Utang Piutang

a) *Al-‘âqidâni*, kedua belah pihak yang melakukan akad utang piutang, yang terdiri dari pihak yang memberi utang dan pihak yang menerima utang.

b) Harta yang dihutangkan

c) *Sighat* akad (ijab qabul)

2) Syarat Utang Piutang

a) Syarat bagi *Al-‘âqidâni*, adalah *ahliyatul al-tabbaru'*, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung

jawab. Baligh, berakal, cakap bertindak hukum sehingga anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.

b) Syarat oyek atau harta yang dihutangkan adalah hal yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.

c) Syarat *shighat* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam *shighat ijab qabul* juga tidak mensyaratkan *qardh* bagi akad lainnya.⁴⁴

Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman utang piutang meliputi berbagai aspek antara lain:

1) Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman

Dalam pinjaman utang piutang tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas utang piutang tersebut. Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih banyak dari yang dipinjamnya.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
 (البقرة (٢): ٢٧٩ - ٢٧٨)

⁴⁴ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, h. 264.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah (2):278-279)⁴⁵

2) Larangan menunda pembayaran utang piutang bagi orang yang mampu

Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar. Karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezoliman.

3) Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar utang piutang

Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar utang piutang dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman.⁴⁶

3. Hiwalah

a. Pengertian Hiwalah

Menurut Bahasa (Etimologi) *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* yang berarti berpindah. *Tahwwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya.⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁴⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Aim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 328.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 265.

Sedangkan secara istilah (terminologi) terdapat perbedaan mengenai hiwalah, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafi

نَقْلُ الْمَطَالِبَةِ مِنَ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَزِمِ⁴⁸

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”.

Dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi *Hiwalah* yang berbeda: Ibnu Abidin mengatakan bahwa *Hiwalah* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhal*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-muhal 'alaih*). Sedangkan Kamal bin Humman mengatakan bahwa *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.⁴⁹

2) Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, *hiwalah* ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.⁵⁰

Pada dasarnya semua definisi di atas hampir sama. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, jilid 3 (Libanon: Daar al Fikr: 1987), h. 210.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 560.

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 234.

menekankan segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga Mazhab lainnya menekankan segi hak menerima pembayaran utang. Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad *hiwalah* maka utang semula menjadi beban pihak yang mengalihkan utang (pihak pertama), secara otomatis terlepas dari dirinya.⁵¹

- 3) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *hiwalah* ialah memindahkan utang dari tanggungan *muhiil* menjadi tanggungan *muhal* 'alaih.⁵²
- 4) Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa *hiwalah* ialah:

نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ⁵³

“Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.”

- 5) Wahbah al-Zuhailly berpendapat, *hiwalah* adalah:

عَقْدٌ يَتَقَضَّى نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ⁵⁴

“Akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain”.

- 6) Sedangkan menurut Idris Ahmad, *hiwalah* adalah Semacam akad (ijab qobul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan.⁵⁵

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 560.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 39.

⁵³ Muhammad Ibn Qosim al-Ghazzi, Al-Bajuri, (Semarang: Usaha Keluarga, tth), h. 376.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 162.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

Dilihat dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

b. Dasar Hukum Hiwalah

Hukum *hiwalah* adalah boleh (*mubah*), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

Syariat dan kebolehan *hiwalah* berlandaskan pada hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواة البخاري)⁵⁶

“Dari Abi Hurairah R.A Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di ikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah”. (HR. Bukhori)

Pada hadits di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (*muhall'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Disamping itu dasar hukum *hiwalah* juga berasal dari *ijma'*. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya *hiwalah* dalam utang, bukan pada

⁵⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, h. 432.

barang.⁵⁷ Karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁵⁸

Sebagian orang menganggap bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan qiyas, karena akad *hiwalah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *hiwalah* adalah karena tidak sejalan dengan qiyas. Ibnul qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa *hiwalah* sesuai dengan qiyas, karena ia masuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang.⁵⁹

c. Rukun dan Syarat Hiwalah

1) Rukun Hiwalah

Hiwalah memiliki rukun-rukun yang menjadi landasannya. Setiap rukun tersebut tentunya memiliki syarat-syarat yang terkait. Berikut adalah rukun-rukun hiwalah beserta syarat-syarat terkaitnya:

a) *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Muhil adalah orang yang berutang (debitor) yang memindahkan utangnya kepada orang lain. *Muhil* haruslah orang yang mampu berakad, yaitu orang yang sudah baligh. *Hiwalah* tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak kecil yang belum bisa berfikir. Mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 449.

⁵⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 127.

⁵⁹ Saleh al-fauzan, *fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005), h. 425.

berakal. padahal, berakal adalah syarat sah untuk melakukan berbagai pemanfaatan harta.

Mazhab Hanafi memperbolehkan *hiwalah* yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah bisa berpikir jika diizinkan oleh walinya atau jika akad tersebut sudah terjadi sebelumnya. Namun, Mazhab Syafi'i melarangnya.

b) *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)

Muhal adalah orang yang member pinjaman (kreditur) yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya atau orang yang memberi pinjaman kepada *muhil* yang memindahkan utangnya untuk dilunasi oleh orang lain.

Muhal harus orang yang sudah cakap untuk berakad, yaitu berakal. Qabul dari *muhal* termasuk rukun akad *hiwalah*. Orang yang tidak berakal tidak akan dapat melakukan qabul. Dipersyaratkan pula bahwa ia sudah baligh. Ini menurut pendapat Mazhab Syafi'i. sebaliknya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa baligh adalah syarat pelaksanaan bukan syarat sahnya. Jika anak kecil yang sudah bisa berpikir menerima *hiwalah*, *qabul* yang dilakukan adalah sah. Akan tetapi, pelaksanaannya bergantung pada izin dari walinya karena dalam *hiwalah* terdapat unsur *mu'awadhah* (transaksi). Menurut mereka, transaksi sah dengan izin wali dan boleh dilakukan atas persetujuan wali.

- c) *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)

Muhal 'alaih adalah orang yang harus melunasi utang kepada *muhal*. *Muhal 'alaih* adalah orang yang sudah baligh. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat atas hal ini. *Hiwalah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, sekalipun ia sudah bisa berpikir. Hal ini karena kewajiban melunasi utang merupakan bagian dari *tabbaru'* (berbuat baik), sedangkan orang yang belum baligh tidak sah ber-*tabbaru'*. Oleh karena itu, menurut ulama Mazhab Hanafi, balighnya *muhal 'alaih* adalah syarat sah, bukan syarat pelaksanaan *hiwalah* sebagaimana dalam persyaratan *muhil* dan *muhal*.

- d) *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*)

Muhal bih adalah hak *muhal* yang harus dilunasi oleh *muhil*. Namun kewajiban (untuk melunasi) hak itu, kemudian dialihkan oleh *muhil* kepada *muhal 'alaih*. Syarat *muhal bih* adalah sebagai berikut:

- (1) Berupa utang. *Hiwalah* tidak sah dalam bentuk benda-benda berwujud karena *hiwalah* merupakan pengalihan hukum. Akad ini mengalihkan utang yang berada dalam suatu tanggungan ke tanggungan orang lain. Pengalihan benda-benda berwujud merupakan pengalihan hakiki, bukan pengalihan hukum. Barang-barang berwujud bukan sesuatu yang “berada dalam

tanggungan kewajiban”. Oleh sebab itu, tidak ada *hiwalah* padanya.

- (2) Utang tersebut bersifat tetap, seperti harga (yang harus dibayar) setekah barang diserahkan dan masa khiyar telah habis. Boleh juga menuju sifat yang tetap, seperti harga sudah disepakati, namun belum habis masa khiyar. Harga ini akan menuju sifatnya yang tetap setelah habis masa khiyar. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi’i.

e) *Sighat* (ijab qabul).

Ijab adalah ucapan *muhil*. Misalnya, “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. *Qabul* adalah ucapan *muhal*, misalnya “saya terima” ijab dan qabul harus dilakukan ditempat akad.⁶⁰

Rukun *hiwalah* menurut Hanafiyah yaitu ijab dari orang yang memindahkan (*al-muhil*) dan qabul dari orang yang dipindahkan (*al-muhal*) dan yang dipindahi utang (*al-muhal ‘alaih*). Sedangkan menurut Malikiyah rukun *hiwalah* ada empat, yaitu:

- (a) Muhil (orang yang memindahkan)
- (b) Muhal bih
- (c) Muhal ‘alaih (orang yang dipindahi hutang)
- (d) Shighat

⁶⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: Hikmah, 2010), h.181-183.

Syafiiyah dan Hanabilah menambahkan dua rukun lagi, yaitu dua utang, utang muhal kepada *muhil*, dan utang *muhil* kepada *muhal* 'alaih.

2) Syarat *Hiwalah*

Hiwalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang adakalanya berkaitan dengan *muhil*, *muhal*, *muhal* 'alaih, *shighat*, maupun hutang itu sendiri.

Menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat, bahwa *hiwalah* menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.

a) Syarat bagi pihak pertama (*muhil*):

(1) Cakap melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baliqh dan berakal.⁶¹ Maka, tidak sah *hiwalah* nya orang gila atau anak kecil.⁶²

(2) Adanya persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hiwalah*, maka akad tersebut tidak sah.⁶³

Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 223.

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 181.

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 223.

kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang padanya.⁶⁴

b) Syarat bagi pihak kedua (*muhal*):

- (1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliqh dan berakal.
- (2) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hiwalah* (Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i).⁶⁵

Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hiwalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar utang tersebut.⁶⁶

c) Syarat bagi pihak ketiga (*muhal 'alaih*):

- (1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
- (2) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab Hanafi). Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad *hiwalah* pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah *hiwalah*.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 561.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 223.

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 561.

(3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad.⁶⁷

d) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhal bih*):

(1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiar (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *hiwalah* tidak sah.

(2) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 224.

(3) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.⁶⁸

(4) Stabilitasnya hutang, jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang gajinya belum dibayar, maka hiwalah tidak sah.⁶⁹ Artinya apabila penghiwalahan diberikan kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.

e) Syarat *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*):

Ijab adalah ucapan *muhiil*, misalnya “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”.

Qabul adalah ucapan *mual*, misalnya “saya terima” atau “saya ridha”. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan ditempat akad.⁷⁰

d. Macam-Macam atau Jenis Hiwalah

Mazhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *hiwalah* dapat dibagi dua.

1) *hiwalah al-haqq* (pemindahan hak)

hiwalah al-haqq (pemindahan hak) yaitu, apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang.

2) *hiwalah ad-dain* (pemindahan utang)

hiwalah ad-dain (pemindahan utang) yaitu, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 562.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 41.

⁷⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 183.

Ditinjau dari sisi lain, *hiwalah* terbagi dua:

1) *Hiwalah al-muqayyadah*

Hiwalah al-muqayyadah (pemindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

2) *Hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak).

Hiwalah al-muthlaqah yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

e. Berakhirnya Hiwalah

1) Pendapat Mazhab Syafi'i.

Konsekuensi hukum *hiwalah* adalah berpindahnya kewajiban (membayar utang) dari *muhil* kepada *muhal 'alaih* dalam bentuk lepasnya tanggung jawab *muhil* untuk membayar utang.

Pada saat itu juga, akad *hiwalah* berakhir. Tidak ada hubungan apa pun lagi antara *muhil* dan *muhal*. Yang tersisa hanyalah hubungan antara *muhal* dengan *muhal 'alaih*. *Muhal* pun tidak berhak lagi untuk menagih kepada *muhil*, bahkan sekalipun *muhal 'alaih* tidak membayar padanya karena suatu sebab. Misalnya, *muhal 'alaih* bangkrut atau mengingkari utang tersebut.

Hal tersebut disebabkan kewajiban (membayar utang) sudah berpindah dengan akad *hiwalah* dari tempatnya yang pertama ke tempat yang lain. Sesuatu yang sudah berpindah dari tempatnya tidak

akan kembali ke tempat semula, kecuali dengan akad perpindahan yang baru lagi.

Demikian juga dengan akad *hiwalah*, kewajiban *muhil* melunasi utang gugur. Sesuatu yang sudah gugur tidak akan kembali (ada lagi), baik karena (yang berkewajiban baru) bangkrut maupun karena sebab lain.

Sama saja dalam hal ini, entah ia (*muhal*) mengetahui bahwa *muhal 'alaih* sedang bangkrut pada saat *hiwalah* ataupun tidak dan dipersyaratkan agar pembayarannya mudah ataupun tidak. Kasus ini sama dengan orang yang membeli sesuatu dan ia ditipu. Ia tidak berhak menuntut apa pun pada penjual sekalipun ia mempersyaratkan tidak adanya penipuan. Ia telah lengah dengan tidak mencari tahu kondisi *muhal 'alaih* pada saat *hiwalah* terjadi. Pada saat yang sama, syarat yang ditetapkan (*muhal*) bisa diabaikan.

2) Pendapat Mazhab Hanafiah.

Jika *muhal* sulit memperoleh pembayaran dari *muhal 'alaih* karena sebab yang jelas, ia berhak kembali menagih utang tersebut kepada *muhil*. Dengan demikian, akad *hiwalah* berakhir. Menurut Abu Hanifah, sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Muhal 'alaih* meninggal dalam keadaan bangkrut.
- b) *Muhal 'alaih* mengingkari akad *hiwalah* sampai berani bersumpah akan hal itu. Ditambah lagi, *muhal* dan *muhil* tidak memiliki bukti tentang adanya akad *hiwalah* tersebut.

- c) Pengikut Abu Hanifah menambahkan sebab yang ketiga, yaitu hakim memutuskan bahwa *muhal 'alaih* bangkrut pada masa hidupnya.

Dalil mereka mengenai hal ini adalah bahwa *muhal* sudah tidak akan mungkin memperoleh haknya dari *muhal 'alaih* dalam situasi-situasi semacam ini. Tambahan lagi, terbebasnya *muhal* dari kewajiban membayar utang terkait dengan terpeliharanya hak *muhal*. Inilah tujuan *hiwalah*. Jika hak *muhal* tidak aman, *muhal* tidak terbebas dari tanggung jawab atas utangnya. Oleh karena itu, *muhal* pun berhak menagih utangnya kembali kepada *muhal*. Jika *muhal* kembali menagih *muhal*, akad *hiwalah* berakhir.

3) Menurut Mazhab Hanafi.

Hiwalah berakhir dengan pembatalan. *Hiwalah* adalah akad yang memiliki unsur transaksional. Dengan demikian, akad ini bisa dibatalkan. Pembatalan dapat terjadi dengan menarik kembali *muhal* dari ijabnya atau menarik kembali *muhal* atau *muhal 'alaih* dari *qabulnya* atas *hiwalah* dan terjadi sebelum *muhal 'alaih* melakukan pembayaran utang. Pengertian pembatalan adalah mengakhiri akad sebelum tujuan akad tersebut tercapai. Ketika *hiwalah* batal, tagihan kembali kepada *muhal*. Sebaliknya, menurut Mazhab Syafi'i, akad *hiwalah* adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembatalan setelah akad sah tidak dapat diterima.

4) Menurut ulama Mazhab Hanafiah

Hiwalah juga berakhir jika sifatnya terikat dan *muhil* meninggal sebelum *muhal* menerima pembayaran utangnya dari *muhal* 'alaih. Harta yang terikat dengan akad *hiwalah* tersebut termasuk peninggalan *muhil*. Menurut mereka, *muhal* bisa kembali kepada ahli warisnya dan menuntut pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab *muhil* kepada mereka.

Hiwalah juga berakhir dengan berakhirnya hukum *hiwalah* itu sendiri, yakni pelunasan utang dari *muhal* 'alaih kepada *muhal*, baik hakikat maupun hukumnya.

Secara hakikat, *hiwalah* berakhir apabila *muhal* 'alaih melunasi utang yang dialihkan kepadanya. Adapun secara hukum, *hiwalah* berakhir jika:

- 1) *Muhal* meninggal dunia dan *muhal* 'alaih merupakan ahli warisnya.
- 2) *Muhal* menghibahkan utang tersebut atau menyedekahkannya kepada *muhal* 'alaih dan ia menerimanya.
- 3) *Muhal* membebaskan *muhal* 'alaih dari kewajibannya membayar utang.⁷¹

f. Akibat Hukum *Hiwalah*

Jika akad *hiwalah* telah terjadi, maka timbul akibat hukum dari akad tersebut, antara lain:

⁷¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, h. 193-195.

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad tersebut didasarkan atas prinsip saling percaya.
- 2) Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- 3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *hiwalah al-mutlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwalah al-mutlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama.
- 4) Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan member *invoice* palsu wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank.⁷²

g. Beban Muhil Setelah *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Andai kata *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau

⁷² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 127.

membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama Jumhur.

Menurut Mazhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal*, ternyata *muhal* 'alaih orang fakir yang tidak memiliki suatu apapun untuk membayar, maka *muhal* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhal* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan *muhal* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (*muhal*) dapat kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.

Manfaat *Hiwalah* yaitu sebagai berikut

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan *simultan*.
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- 3) Dapat menjadi salah satu *free-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.⁷³

h. Unsur Kerelaan dalam *Hiwalah*

- 1) Kerelaan *Muhal*

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *muhal* adalah hal yang wajib dalam

⁷³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 245.

hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaan. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika *muhal 'alaih* itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *muhal* wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhal* untuk menerima *hiwalah* adalah karena *muhal 'alaih* kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhal 'alaih* mudah dan cepat membayar utangnya, dapat dikatakan bahwa *muhal* wajib menerima *hiwalah*. Namun jika *muhal 'alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar utangnya, semua ulama berpendapat *muhal* tidak wajib menerima *hiwalah*.

2) Kerelaan *Muhal 'Alaih*

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhal 'alaih*, ini berdasarkan hadist yang artinya : jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). Di samping itu, hak ada pada *muhil* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan utang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang *rajih (valid)* adalah tidak diisyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih*. Dan *muhal 'alaih* akan membayar utangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.⁷⁴

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Skripsi sebelumnya, pernah diteliti oleh Anisa Nursusilowati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada produk jasa *Hawalah* (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan *hiwalah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jatimulyo Lampung Selatan serta manajemen risiko pembiayaan dalam perspektif Hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah manajemen risiko dalam pembiayaan *hiwalah* adalah menggunakan proses analisis 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*, dan *syariah*. Dan untuk meminimalisir risiko dalam pembiayaan *hiwalah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jatimulyo Lampung Selatan dengan

⁷⁴Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2004), h.215-216.

cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selanjutnya manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jatimulyo Lampung Selatan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena pihak BMT menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah Swt akan harta kekayaan demi kemaslahatan manusia.

Skripsi selanjutnya pernah diteliti oleh Lubna Laelatul Farhan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2018, yang berjudul Penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan akad *hawalah* dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa penerapan akad *hawalah* transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana pihak Bank Leasing selaku *muhil* tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan debitur selaku *muhil* dan *muhil* 'alaih. Sedangkan *shigat* dalam melakukan akad *hawalah* harus ada kesepakatan atau kerelaan dari

pihak Bank Leasing selaku *muhal*. Dalam praktiknya transaksi over kredit mobil terdapat akad jual beli. Sehingga terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan hawalah.



BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Serdang

Pada awalnya Desa Serdang hanya memiliki 4 (empat) wilayah dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Sebelum terbentuknya Desa Serdang keempat dusun tersebut masih menjadi bagian Desa Jati Baru yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1964 para tokoh masyarakat berkeinginan untuk membentuk Desa sendiri dan akhirnya dilakukan musyawarah Desa dengan warga setempat. Pada musyawarah tersebut telah disaksikan dari pihak pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten. Hasil dari keputusan musyawarah besar tersebut menyatakan Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4 menjadi suatu desa yang diberi nama Desa Serdang dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Seiring dengan berjalannya waktu sekitar pada tahun 1984 wilayah Desa Serdang memiliki 8 (delapan) bagian Dusun, yaitu Dusun 1A, Dusun 1B, Dusun 2A, Dusun 2B, Dusun 3A, Dusun 3B, Dusun 4A, serta Dusun 4B. Dan pada tahun 2015 terjadi lagi pembagian wilayah di Desa Serdang menjadi 12 Dusun, adapun tambahan wilayah tersebut yaitu antara lain

Dusun Karang Asem, Dusun Griya Industri, Dusun Griya Sejahtera, serta Dusun Mekar Jaya.

Dalam Sejarah Pemerintahan Desa Serdang telah mengalami beberapa pergantian kepala Desa yang memimpin baik sebelum dan sesudah terbentuknya Desa Serdang, adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang

No.	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1.	1964-1967	SALEH ZUBIR
2.	1967-1973	SALEH ZUBIR
3.	1973-1990	KUSYONO
4.	1990-1995	NGADIMAN
5.	1995-2003	KUSYONO
6.	2003-2011	SABAR
7.	2011-2016	MUKHLIS SUWITO
8.	2016-2017	MUHSARI
9.	2017- Sekarang	SUPRIYONO

Sumber Data: Monografi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

2. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Serdang

a. Keadaan Geografis

Desa Serdang adalah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki luas administrasi lahan sebesar 693.7 Ha. Topografi Desa Serdang berupa dataran tinggi dengan ketinggian tanah 30 M diatas permukaan laut. Intensitas curah

hujan di Desa Serdang yaitu sebesar 2.500-3.000 mm/th, dengan suhu udara sebesar 25-30 derajat Celcius.

Secara administrasi Desa Serdang merupakan bagian dari Kecamatan Tanjung Bintang. Orbitasi atau jarak dari Pusat Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak Dari Ibukota Kecamatan : 4 Km
- 2) Jarak Dari Ibukota Kabupaten : 75 Km
- 3) Jarak Dari Ibukota Provinsi : 30 Km

Wilayah administrasi Desa Serdang memiliki batas wilayah, sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara Desa Serdang berbatasan dengan Desa Jati Indah
- 2) Sebelah Timur Desa Serdang berbatasan dengan Desa Jati Baru
- 3) Sebelah Selatan Desa Serdang berbatasan dengan Desa Sinar Ogan
- 4) Sebelah Barat Desa Serdang berbatasan dengan Desa Sukanegara

b. Keadaan Demografis

Desa Serdang memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.821 Jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.169 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.652 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebesar 3.015 Kepala Keluarga.

Tabel 2.
Jumlah Warga Masyarakat Desa Serdang
Kecamatan Tanjung Bintang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.169 Jiwa
2.	Perempuan	6.652 Jiwa
Jumlah Seluruhnya		11.821 Jiwa
Kepala Keluarga		3.015 Kepala Keluarga
Jumlah Rumah		2.976 Rumah

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

Dari data tabel yang telah diperoleh tersebut di atas maka Desa Serdang termasuk dalam kategori desa dengan jumlah penduduk besar dengan mayoritas warga masyarakat Desa Serdang berjenis kelamin Perempuan dengan jumlah 6.652 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut tersebar di 12 (dua belas) Dusun. Adapun Dusun-Dusun tersebut antara lain:

Tabel 3.

Jumlah Dusun di Desa Serdang

No.	Nama Dusun	Kepala Dusun
1.	Dusun 1 A	Sumarno
2.	Dusun 1 B	Budi Iswoyo
3.	Dusun 2 A	Supardiono
4.	Dusun 2 B	Tarmuji
5.	Dusun 3 A	Mujiman
6.	Dusun 3 B	Misno
7.	Dusun 4 A	Sukiman
8.	Dusun 4 B	Ngatirin
9.	Dusun Karang Asem	Sukaris
10.	Dusun Griya Industri	Surono
11.	Dusun Griya Sejahtera	Sam'un
12.	Dusun Mekar Jaya	Hardiyanto

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

3. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Serdang

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencanharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	KARYAWAN/BURUH SWASTA	1.435
2.	BURUH TANI	1.210
3.	PETANI	615
4.	WIRASWASTA/PEDAGANG	254
5.	GURU	180
6.	PETERNAK	42
7.	JASA	144
8.	TUKANG/BURUH BANGUNAN	124
9.	PNS/TNI/POLRI	119
10.	PERANGKAT DESA	83
11.	PENSIUNAN	80
12.	TENAGA KESEHATAN	41

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

Dari data tabel yang telah diperoleh tersebut di atas menunjukan bahwa mayoritas warga masyarakat Desa Serdang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan/buruh swasta dengan jumlah 1.435 jiwa.

Dalam menjalin ukhuwah dikalangan masyarakat, warga masyarakat memiliki jalan untuk mengikuti lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Serdang. Baik lembaga yang bersifat Sosial maupun lembaga yang bersifat Keagamaan. Adapun Lembaga-lembaga yang ada di Desa Serdang, antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.
Lembaga Kemasyarakatan Desa Serdang

NO.	NAMA LEMBAGA	JUMLAH
1.	LPM	1
2.	PENGAJIAN	12
3.	SIMPAN PINJAM	7
4.	DAPOKTANI	2
5.	KARANG TARUNA	13
6.	RISMA	12
7.	ORMAS/LSM	3
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		50

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

4. Struktur Pemerintahan

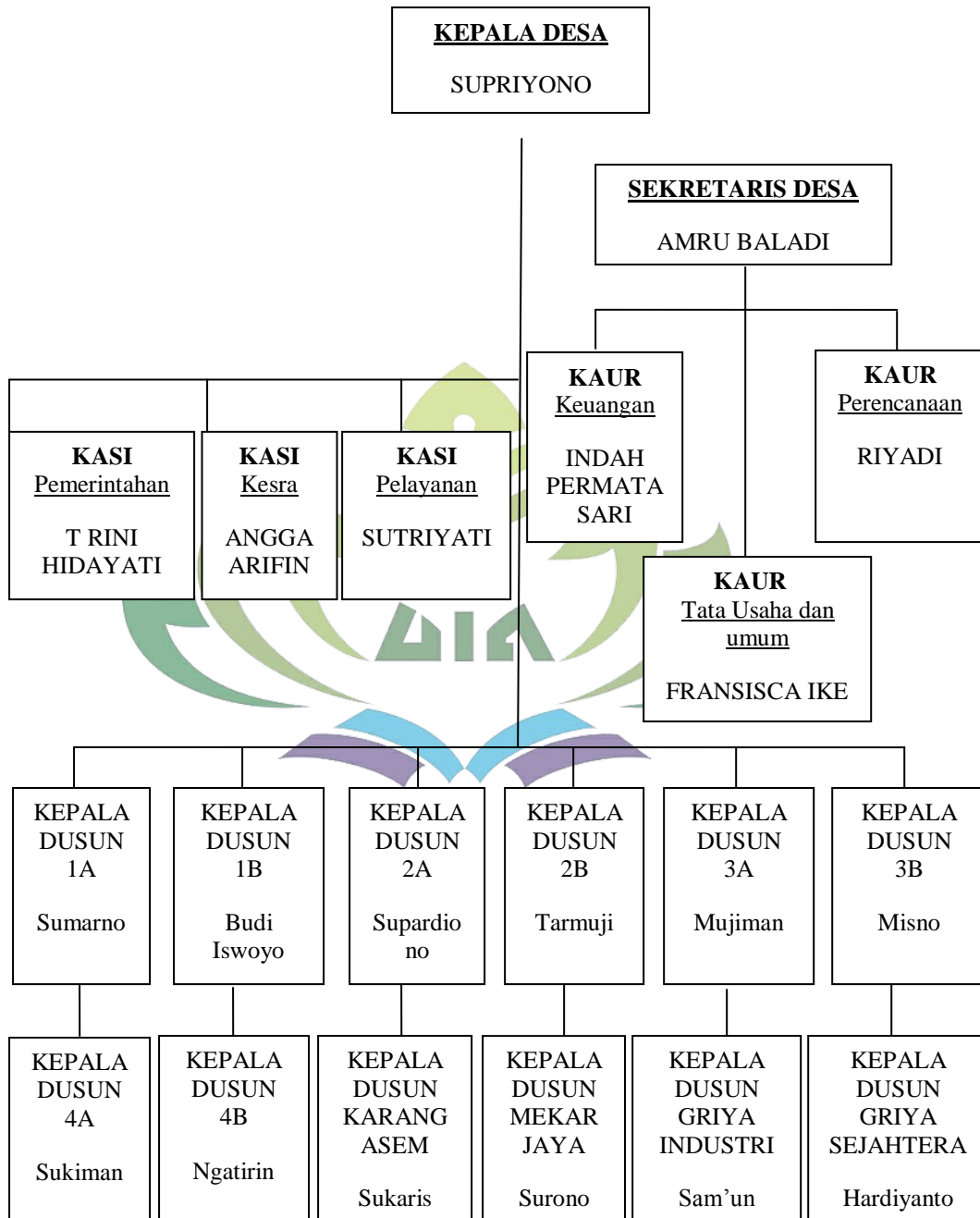
Tabel 6.
Lembaga Pemerintahan Desa

NO.	LEMBAGA PEMERINTAHAN	JUMLAH
1.	KEPALA DESA	1 orang
2.	SEKRETARIS	1 orang
3.	KAUR dan KASI	6 orang
4.	KADUS	12 orang
5.	KETUA RT	54 orang
6.	BPD	9 orang

Sumber Data: Dokumentasi Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun, dicatat tanggal 15 Juli 2019)

Bagan 1.

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SERDANG**



B. Praktik *Hiwalah* di Desa Serdang

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa Serdang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung selatan. Berdasarkan data yang ditunjukkan dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 11.821 Jiwa, sebanyak 42 orang berprofesi sebagai Peternak.

Masyarakat yang memiliki usaha ternak, dalam pengurusan ternak tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti contohnya untuk membeli pakan, obat-obatan untuk hewan ternak, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit peternak yang berhutang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tidak hanya masyarakat yang memiliki usaha ternak saja yang melakukan utang piutang, masyarakat dengan pekerjaan berbedapun pernah melakukan utang piutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam melakukan praktik utang piutang tentu saja harus disertai dengan pembayaran setelahnya. Banyak cara yang dilakukan guna melunasi pembayaran utang piutang tersebut, salah satunya dengan *hiwalah* (pengalihan utang).

Masyarakat Desa Serdang menganggap praktek *hiwalah* sudah menjadi hal yang lumrah, pasalnya praktik *hiwalah* dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah terkait utang piutang. Dengan adanya

hiwalah, utang yang telah lama tidak dibayar bisa dibayar karena *hiwalah*. Praktik *hiwalah* di Desa Serdang biasa dilakukan antara keluarga, tetangga atau orang yang sama-sama saling mengenal, biasanya pengalihan utang lebih banyak ke praktek *hiwalah* yang dilakukan dalam hutang piutang uang, tetapi ada juga yang terjadi dalam jual beli.

Terkait praktik pengalihan utang (*hiwalah*) yang terjadi di Desa Serdang, melakukan wawancara terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai peternak dan broker yang terlibat dan mengetahui secara langsung praktik tersebut. Dan dari wawancara yang telah dilakukan, terdapat jawaban masyarakat sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan bapak Muladiyono (*muhal*)

Bapak Muladiyono (57 th, pekerjaan peternak) menuturkan bahwa beliau sering memberi utang baik pada sesama peternak maupun broker. Utang diberikan pada saat ada yang membeli ayam dengan sistem DO, ayam diantar terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan kemudian hari. Syarat dalam pembelian dengan sistem DO tersebut yang terpenting adalah niat untuk membayar lunas. Dalam pembayaran utang tersebut juga banyak yang melakukan pembayaran dengan dialihkan kepada orang lain. Pembayaran utang dengan pengalihan yang pernah terjadi yaitu ada broker yaitu bapak Amat Rohani yang membeli ayam 260 ekor dengan harga Rp. 5.720.000,-. Tetapi broker itu akan membayarkan sebesar Rp.6.000.000,- apabila saya (bapak Muladiyono) mau menerima pembayaran utangnya dialihkan kepada orang lain yaitu bapak Parji. Kelebihan tersebut

diperjanjikan karena ia harus menagihnya sendiri kepada orang yang menerima pengalihan. Dikhawatirkan akan sulit tertagih maka ditawarkan imbalan terlebih dahulu. Perbedaan pembayaran utang jika utang tersebut dialihkan memang sering terjadi. Bahkan sudah seperti kebiasaan jika mau mengalihkan utang terlebih dahulu menawarkan imbalan.¹

2. Hasil wawancara dengan bapak Amat Rohani (*muhil*)

Menurut bapak Amat rohani (50 tahun, pekerjaan broker kebutuhan ternak), dalam menjalankan usahanya tersebut beliau pernah melakukan utang maupun piutang kepada konsumen yang kebanyakan adalah peternak. Utang yang diberikan kepada konsumen yaitu ketika para konsumen membeli kebutuhan untuk ternaknya. Biasanya para peternak mengambil barang yang dibeli terlebih dahulu dan pembayaran akan dilakukan pada waktu yang berbeda. Banyak dari peternak yang melakukan pembayaran pada saat pembelian berikutnya. Pada saat itu peternak melunasi pembelian sebelumnya dan pada saat bersamaan peternak membeli kebutuhan ternak dengan cara dihutang. Ada juga yang pembayarannya ditunda hingga beberapa kali pembelian. Pembayaran utang tersebut tidak disyaratkan adanya waktu jatuh tempo pembayaran. Tetapi apabila sudah terjadi dua kali pembelian dan keduanya belum dibayarkan lunas dan peternak ingin membeli kebutuhan secara hutang lagi maka barang yang diberikan akan dikurangi jumlahnya dari permintaan awal.

¹Wawancara dengan Bapak Muladiyono, pada tanggal 1 Agustus 2019

Dalam pembayaran utang beliau pernah mengalami pengalihan utang dan mengalihkan utang. Pengalihan utang terjadi dikarenakan peternak memiliki utang yang telah lama tidak dibayar. Beliau melakukan pengalihan utang dengan menyiasati dalam transaksi jual beli ayam, karena risiko merugi pada jual beli ayam lebih kecil. Pengalihan utang yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan jumlah utang yang ada. Pembayaran utang yang dialihkan terkadang lebih besar jumlahnya dari utang sebenarnya. Perbedaan jumlah tersebut disepakati pada awal perjanjian pengalihan utang dan sudah menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai imbalan karena sudah mau menerima pembayaran utang dengan dialihkan.²

3. Hasil wawancara dengan bapak Parji (*Muhal Alaih*)

Bapak Parji (47 th, pekerja peternak) menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya beliau pernah melakukan utang piutang terhadap broker. Utang itu didapat saat pertama membeli pakan ke broker namun dengan berhutang satu nota dengan jumlah pakan 16 sak, dan berhutang lagi satu nota ketika pakan habis. Untuk mendapat utang itu tidak ada syarat apapun. Faktor penyebab melakukan utang dikarenakan belum memiliki uang untuk membeli pakan, sedangkan ayam-ayam harus diberi pakan tiap hari. Terkait pembayaran utang tersebut beliau pernah mengalami pengalihan utang. Saat itu beliau memiliki utang dua nota dan belum bisa membayar, dikarenakan ayam yang dipelihara masih baru dan

²Wawancara dengan Bapak Amat Rohani, pada tanggal 1 Agustus 2019

belum bisa bertelur sehingga belum ada penghasilan dari ternak. Mungkin karena utang itu lama dilunasinya, maka utang beliau tersebut dialihkan oleh broker kepada orang lain yaitu peternak. Pengalihan utang itu diketahui dan disepakati bersama, karena pada saat perjanjian pengalihan tersebut semua pihak sedang bersama. Walaupun jumlah utang yang dialihkan berbeda dengan utang yang dimiliki broker terhadap peternak tersebut tetapi hal itu telah disepakati bersama.³

4. Hasil wawancara dengan bapak Arif (*muhal*)

Bapak arif (32 th, pekerjaan peternak) menuturkan bahwa dalam menjual hasil ternaknya yang berupa ayam beliau pernah memberi utang kepada orang yang ingin membeli. Dalam memberikan utang tersebut beliau tidak mensyaratkan apapun kepada orang yang berhutang. Konsumen dalam melunsi utang tersebut pernah melakukan pengalihan pembayaran utang. Biasanya pengalihan utang dilakukan karena orang yang berhutang kepada nya memiliki piutang sama orang lain yang telah lama belum dibayar, supaya hak atas piutang itu diterima maka dilakukan pengalihan utang. Pengalihan yang pernah terjadi yaitu ketika ada broker yang membeli ayam dengan berhutang seharga Rp. 3.400.000,- dan yang membayarnya adalah orang lain dengan harga Rp. 3.460.000,- sehingga mendapat keuntungan Rp. 60.000,- dari pengalihan

³Wawancara dengan Bapak Parji, pada tanggal 1 Agustus 2019

utang tersebut. Terjadi perbedaan pembayaran itu sudah diketahui sejak awal, dan terjadi atas kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁴

5. Hasil wawancara dengan Helmi (*Muhil*)

Bapak Helmi (54 tahun, pekerjaan broker kebutuhan ternak), menuturkan bahwa dalam jual beli pernah melakukan utang. Berhutang menurutnya adalah hal yang wajar. Dalam jual beli ayam dengan peternak pembeliannya biasa menggunakan sistem membeli nota, jadi terlebih dahulu dibawa nota pembeliannya dan ayam dikirim, baru pembayaran dibayarkan setelah ayam datang. Untuk pembayaran biasanya langsung dibayarkan keesokan harinya, terkadang juga dihutang dalam waktu yang telah disepakati. Pembayaran utang pula pernah dengan cara dialihkan, pengalihan dilakukan karena banyak konsumen beliau yang sulit dan lama dalam membayar utang. Padahal dari pelunasan tersebut uangnya akan diputar untuk modal usaha, supaya usahanya tidak macet maka dilakukan pengalihan utang dalam jual beli ayam. Pengalihan utang tersebut terjadi pada saat membeli ayam kepada peternak, beliau menyatakan bahwa pembayaran akan dibayarkan oleh orang lain, karena orang tersebut memiliki utang kepadanya seharga Rp. 3.460.000,-. Sedangkan pembelian ayam yang dihutang tersebut hanya seharga Rp. 3.400.000,-. Apabila peternak itu mau menerima pembayaran utang dengan dialihkan maka peternak itu akan menerima pembayaran utang sejumlah Rp. 3.460.000,- sehingga mendapat untung Rp. 60.000,- dari

⁴Wawancara dengan Bapak Arif, pada tanggal 4 Agustus 2019

penjualan ayam tersebut. Pada saat peternak menyetujui, barulah pada saat itu memberi tahu kepada orang yang menerima pengalihan bahwa utangnya terhadap bapak Helmi sudah lunas karena utangnya dialihkan kepada Peternak tersebut. Dalam melakukan pengalihan utang tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁵

6. Hasil wawancara dengan bapak Suparno (*Muhal Alaih*)

Bapak Suparno (37 th, peternak) menuturkan bahwa beliau pernah melakukan utang untuk kebutuhan kandangnya. Utang itu didapat saat membeli pakan ke broker dengan berhutang nota, pakan terlebih dahulu diambil dan pembayarannya dilakukan esoknya. Utang tersebut hampir sering dilakukan ketika melakukan pembelian pakan. Untuk mendapat utang itu tidak ada syarat apapun. Dalam pembayaran utang beliau pernah mengalami pengalihan utang. Ketika beliau memiliki utang satu nota dan sampai waktu yang cukup lama belum bisa membayar, maka utang itu dialihkan oleh broker kepada peternak. Pengalihan itu dilakukan karena broker yang dihutangi beliau memiliki utang pula dengan peternak, dan agar utang broker terhadap peternak tersebut lunas, maka utangnya dialihkan. Jadi awalnya beliau berhutang pakan dengan broker kemudian berubah menjadi utang ayam kepada peternak. Pengalihan utang itu disepakati bersama.⁶

⁵Wawancara dengan Bapak Helmi, pada tanggal 4 Agustus 2019

⁶Wawancara dengan Bapak Suparno, pada tanggal 4 Agustus 2019

7. Hasil wawancara dengan bapak Amat (*muhal*)

Bapak Amat (50 th, pekerjaan broker kebutuhan ayam) menyatakan bahwa beliau pernah memberi utang kepada orang yang membeli ayam. Utang diberikan kalau ada yang membeli ayam dengan berhutang. Utang yang diberikan hanya boleh 2 nota, jika sudah membeli ayam dan berhutang dua nota kemudian utang tersebut belum dibayar maka tidak boleh berhutang lagi. Pembayaran utang juga pernah dilakukan dengan dialihkan kepada orang lain. Pembayaran utang dengan pengalihan pernah terjadi ketika ada yang membeli ayam dan mengatakan pembayarannya akan dibayarkan oleh orang lain, serta di janjikan pembayaran tersebut lebih dari utang pembelian ayam. Pengalihan utang itu terjadi tanpa ada paksaan dan terjadi atas kesepakatan bersama. Ketika ada pengalihan utang dan harus menagihnya sendiri kepada orang yang bersangkutan, biasanya beliau mendapat imbalan karena resiko dari utang yang dialihkan adalah sulit tertagih. Maka dari itu mendapatkan imbalan, dan imbalan tersebut diketahui dari awal perjanjian namun baru didapat ketika utang sudah tertagih.⁷

8. Hasil wawancara dengan bapak Santo (*Muhil*)

Bapak Santo (40 th, pekerjaan peternak), menuturkan bahwa sebagai peternak beliau pernah berhutang kebutuhan ternak kepada broker. Berhutang sudah menjadi kebiasaan peternak. Karena dalam pembelian ayam maupun pakan biasa dilakukan dengan pembelian DO. Barang datang

⁷Wawancara dengan Bapak Amat, pada tanggal 5 Agustus 2019

terlebih dahulu dan pembayarannya pada saat pembelian DO selanjutnya. Terkait pengalihan utang beliau menuturkan bahwa pernah melakukan pengalihan utang pada saat pembelian DO ayam. Kalau pembelian DO pakan tidak pernah melakukan pengalihan. Utang itu dialihkan karena uang untuk pembayaran utang terpakai dan kebetulan beliau memiliki piutang pada orang lain. Sehingga orang tersebut yang akan menerima pengalihan utang. Untuk melakukan pengalihan tidak ada syarat apapun, hanya pengertiannya saja untuk melebihi pembayaran sebagai imbalan kepada orang yang menerima pengalihan utang karena sudah mau menagih piutangnya sendiri. Pengalihan disepakati oleh semua pihak yang terlibat, walaupun pada awal perjanjian hanya dihadiri oleh beliau dan broker.⁸

9. Hasil wawancara dengan bapak Budiman (*Muhal Alaih*)

Bapak budiman (28 th, pekerjaan peternak) menuturkan bahwa beliau pernah melakukan utang untuk kebutuhan kandangnya. Utang tersebut hampir sering dilakukan ketika melakukan pembelian pakan. Utang yang dimiliki beliau pernah dialihkan kepada orang lain. Pengalihan utang tersebut terjadi pada awalnya dikarenakan beliau berhutang pakan ke sesama peternak, yang pada saat itu beliau tidak bisa berhutang kepada broker karena masih memiliki sangkutan dua nota. Ketika utang tersebut belum sempat dibayar, peternak itu mengatakan bahwa utang beliau terhadap nya sudah lunas karena utang beliau

⁸Wawancara dengan Bapak Santo, pada tanggal 5 Agustus 2019

dialihkan kepada broker. Peternak itu membeli ayam dengan berhutang, dan hutang tersebut dialihkan.⁹

10. Hasil wawancara dengan bapak Helmi (*muhal*)

Bapak Helmi (54 tahun, pekerjaan broker kebutuhan ternak), menuturkan bahwa dalam menjual ayam-ayam nya beliau pernah dihutang oleh orang yang membeli ayam tersebut. Utang dalam jual beli menurutnya adalah hal yang wajar. Dalam memberikan utang tersebut beliau tidak mensyaratkan apapun kepada orang yang berhutang, hanya saja ada niat untuk membayar utang maka boleh berhutang. Banyak cara konsumen dalam melunsi utang tersebut, seperti halnya pernah melakukan pengalihan pembayaran utang. Pengalihan yang pernah terjadi ketika ada konsumen yang membeli ayam dengan berhutang seharga Rp. 4.740.000,- dan yang membayarnya adalah orang lain dengan harga Rp. 4.820.000,-. Terjadi perbedaan pembayaran itu sudah diketahui sejak awal, dan terjadi atas kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perbedaan imbalan tersebut dianggapkan sebagai imbalan.¹⁰

11. Hasil wawancara dengan bapak Syarkoni (*Muhal*)

Bapak Syarkoni (42 th, pekerjaan peternak), menuturkan bahwa dalam menjalankan usaha sebagai peternak ayam beliau pernah melakukan utang dalam setiap membeli ayam kepada broker. Ketika beliau menerima pesanan ayam dari orang, maka beliau mengambil ayam terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Selain berhutang beliau

⁹Wawancara dengan Bapak Budiman, pada tanggal 5 Agustus 2019

¹⁰Wawancara dengan Bapak Helmi, pada tanggal 6 Agustus 2019

juga sering memberi piutang kepada orang yang membeli ayam melalui perantara dirinya dengan cara berhutang. Pembayaran utang beliau terhadap broker pernah dilakukannya dengan pengalihan utang. Utang tersebut dialihkan pada saat beliau membeli ayam pada broker, dan pada saat itu beliau menyatakan kepada broker bahwa pembelian ayam itu akan dilakukan dengan dihutang, tetapi pembayaran utang itu yang akan membayarnya adalah orang lain. Karena orang tersebut memiliki utang pada beliau. Lalu broker itu pun menerima permintaan beliau mengenai pembayaran utang yang dialihkan, tanpa ada syarat-syarat yang diberikan, hanya saja jika ingin melakukan utang dan pembayarannya dialihkan ke orang lain sudah menjadi kebiasaan untuk memberi imbalan, walaupun imbalan yang diberikan tidak dengan nominal yang besar. Imbalan diberitahukan pada saat ingin melakukan pengalihan, karena risiko utang lama atau bahkan tidak tertagih itu besar.¹¹

12. Hasil wawancara dengan bapak Seno (*Muhal Alaih*)

Bapak Seno (36 th, peternak) menyatakan bahwa beliau pernah melakukan utang dalam membeli ayam. Utang itu didapat saat membeli ayam ke peternak. Untuk mendapat utang itu tidak ada syarat apapun. Dalam utang tersebut beliau pernah mengalami pengalihan utang. Ketika beliau memiliki utang dan sampai waktu yang cukup lama belum bisa membayar, pada saat itu utangnya dialihkan ke broker. Pengalihan itu dilakukan karena peternak yang dihutangi beliau memiliki utang pula dengan broker, dan

¹¹Wawancara dengan Bapak Syarkoni, pada tanggal 6 Agustus 2019

agar utang peternak kepada broker tersebut lunas, maka utangnya dialihkan. Jadi awalnya beliau berhutang ayam dengan peternak kemudian berubah menjadi utang ayam kepada broker. Utang antara keduanya pun terdapat perbedaan namun pengalihan utang itu disepakati bersama.¹²



¹²Wawancara dengan Bapak Seno, pada tanggal 6 Agustus 2019

BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik *Hiwalah* dalam Transaksi Jual Beli Ayam

Melihat apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya terkait hasil penelitian lapangan terhadap praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam, maka dapat dilakukan analisis bahwa praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam adalah sebagai berikut:

Praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi, pada dasarnya terdiri dari akad yang tergabung menjadi satu yaitu akad jual beli, utang piutang, dan pengalihan utang (*hiwalah*). Dari penelitian tersebut ditemukan adanya empat kasus praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam. Praktik tersebut biasa dilakukan antara broker dan peternak.

Dalam praktik yang pertama *hiwalah* terjadi antara bapak Amat, bapak Muladiyono dan Bapak Parji. Bapak Amat membeli ayam sejumlah 260 ekor seharga Rp. 5.720.000 kepada bapak Muladiyono. Namun, pembelian ini dilakukan dengan sistem DO atau berhutang, dan pembayarannya akan dialihkan ke orang lain yaitu bapak Parji, sehingga bapak Parjilah yang nantinya memiliki utang dari pembelian ayam tersebut. Pembayaran utang dilakukan dengan dialihkan dikarenakan bapak Amat memiliki piutang terhadap bapak parji sebesar Rp. 6.000.000. Apabila bapak Muladiyono sepakat atas pembayaran utang yang dialihkan maka bapak Muladiyono mendapat kelebihan sebesar Rp. 280.000. kelebihan tersebut diberitahukan

sejak awal dan dianggap sebagai imbalan karena bapak Muladiyono harus menagih piutangnya secara langsung kepada bapak Parji.

Praktik yang kedua, *hiwalah* terjadi antara bapak Arif, bapak Helmi dan Bapak Suparno. Bapak Helmi membeli ayam seharga Rp. 3.400.000 dengan berhutang kepada bapak Arif. Namun, pembayarannya akan dialihkan ke orang lain yaitu bapak Suparno, dikarenakan bapak Helmi memiliki piutang terhadap bapak parji sebesar Rp. 3.460.000. Apabila bapak Arif sepakat atas pembayaran utang yang dialihkan maka bapak Arif mendapat kelebihan sebesar Rp. 60.000. kelebihan tersebut diberitahukan sejak awal dan dianggap sebagai imbalan. Kesepakatan pengalihan utang tersebut hanya diketahui dan disepakati oleh bapak Arif serta bapak Helmi.

Praktik *hiwalah* yang ketiga terjadi antara bapak Santo, bapak Amat dan Bapak Budiman. Bapak Amat memberi utang kepada bapak Santo pada saat bapak Santo membeli Ayam pada beliau, dari utang yang diberikan tersebut pembayarannya akan dialihkan ke orang lain yaitu bapak Budiman, dikarenakan bapak Budiman awam mulanya memiliki utang terhadap bapak Santo. Namun, utang yang dimiliki antara bapak Santo kepada bapak Amat, dan utang bapak Budiman kepada bapak Santo tidak memiliki kesamaan jumlah dan nominalnya. Sehingga dalam pengalihan tersebut ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari perbedaan utang tersebut.

Praktik yang keempat, *hiwalah* terjadi antara bapak Syarkoni, bapak Helmi dan Bapak Seno. Bapak Syarkoni membeli ayam seharga Rp. 4.740.000 dengan berhutang kepada bapak Helmi. Namun, pembayarannya akan

dialihkan ke orang lain yaitu bapak Seno, dikarenakan bapak Syarkoni memiliki piutang terhadap bapak Seno sebesar Rp. 4.820.000. Apabila bapak Helmi sepakat atas pembayaran utang yang dialihkan maka bapak Helmi mendapat kelebihan sebesar Rp. 80.000. kelebihan tersebut diberitahukan sejak awal dan dianggap sebagai imbalan, karena bapak Helmi harus menagih piutangnya secara langsung kepada bapak Parji dan tidak melalui perantara bapak Syarkoni. Kesepakatan pengalihan utang tersebut hanya diketahui dan disepakati oleh bapak Helmi serta bapak Syarkoni.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwalah* dalam Transaksi Jual Beli Ayam

Islam adalah Agama yang sempurna yang selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang salah satunya terkait dengan muamalah.

Hiwalah merupakan produk muamalah yang akadnya tergolong sebagai akad *tabbaru'* (tolong menolong). Hal tersebut tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain guna tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dan Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

Islam menyarankan bahwa utang piutang dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Dan jika sudah mampu untuk membayar, maka segeralah

dilunasi utang tersebut. Apabila dalam keadaan mampu namun enggan untuk membayar maka kita termasuk golongan orang yang dzolim. Dan bagi orang yang sulit atau tidak bisa membayar utang, apabila ada orang mampu yang ingin menanggihkan utang itu maka terimalah.

Hiwalah dibolehkan dalam Islam sesuai dengan hadits Rasulullah saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلٌ .
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواة البخاري)

“Dari Abi Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutang nya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (HR. Bukhori)”

Praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi, pada dasarnya terdiri dari akad yang tergabung menjadi satu yaitu akad jual beli, utang piutang, dan pengalihan utang (*hiwalah*). Akad-akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”.

Selain dasar hukum tersebut, tentunya harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat, baik terkait rukun maupun syarat sahnya *hiwalah*. Terkait rukun *hiwalah* yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, menerangkan bahwa yang menjadi rukun dalam *hiwalah* antara lain:

1. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang),
2. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*),
3. *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*),

4. *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*), serta
5. *Sighat* (ijab qabul).

Rukun dalam praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang pada dasarnya sudah sesuai dengan rukun *hiwalah* yang di syariatkan oleh Islam, dalam praktik tersebut terdiri dari *muhal* (orang (orang yang berpiutang kepada *muhil*), *muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang), *muhal 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*), *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*), serta *Sighat* (ijab qabul).

Muhil, *muhal*, serta *muhal 'alaih* dalam Islam disyaratkan sebagai orang yang cakap hukum dalam artian baligh dan berakal. Bukan anak kecil maupun orang yang gila. Dan dalam praktiknya hal tersebut sudah terpenuhi. *Muhil*, *muhal*, serta *muhal 'alaih* merupakan orang yang cakap hukum, baligh dan berakal. *Hiwalah* dilakukan atas persetujuan serta keridhoan *muhal* dan *muhal*, tanpa adanya persetujuan *muhal 'alaih*. Walaupun *muhal 'alaih* pada awalnya tidak mengetahui terjadinya *hiwalah* dan tidak adanya persetujuan dari *muhal 'alaih* pada saat awal akad, Mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hanbali tidak mepermasalahkannya, sebab dalam akad *hiwalah* pihak ketiga dianggap sebagai objek akad. Syaratsah terkait shighat pula menyatakan bahwa shighat hanya dilakukan oleh *muhil* dan *muhal* untuk melakukan ijab qobul. Sehingga terkait para pihak dan shighat tidak memiliki masalah yang membuat akad *hiwalah* tersebut batal atau tidak sah.

Syarat mengenai *muhalbih* Islam mensyaratkan bahwasanya sesuatu yang dialihkan itu merupakan sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khیار (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *hiwalah* tidak sah.

Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Muhal bih yang ada dalam praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang adalah *muhal bih* merupakan utang yang timbul akibat dari jual beli ayam yang masih dalam masa khiyar, walaupun dalam akad jual beli tersebut tidak disebutkan tentang khiyar.

Utang yang dimiliki pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama tidak memiliki kesesuaian jumlah atau nominalnya.

Dilihat dari jenis atau macam-macam *hiwalah*, praktik *hiwalah* yang terjadi dalam transaksi jual beli ayam tersebut termasuk dalam *hiwalah al-muqayyadah*.

hiwalah al-muqayyadah merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. *hiwalah al-muqayyadah* juga dapat dikatakan sebagai pemindahan bersyarat. Namun, *hiwalah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah al-dain* (pemindahan utang), dan di sisi lain sebagai *hiwalah al-haq* (pemindahan hak).

Jadi, dikarenakan *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang merupakan *hiwalah al-muqayyadah* maka *muhall bih* yang ada belum sesuai dengan syarat sah terkait *muhall bih*. Dan dapat dikatakan bahwasanya *hiwalah* tersebut tidak sah, dikarenakan utang yang dimiliki pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama tidak memiliki kesesuaian jumlah nominalnya. Walaupun rukun sudah terpenuhi namun terkait syarat sah dari rukun tersebut ada yang tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Maka *hiwalah* dianggap tidak memenuhi syarat sahnya *hiwalah*.

Selain itu pula perbedaan utang yang terjadi sudah diketahui pada saat akan terjadinya perjanjian utang dan pengalihan utang, perbedaan utang tersebut diperjanjikan sebagai imbalan. Sedangkan imbalan yang diberitahukan pada awal melakukan utang tidak diperbolehkan pula dalam Islam, karena hal itu dikhawatirkan akan menuju pada riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Hiwalah* dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi di Desa Serdang Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. Maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang biasa dilakukan oleh beberapa peternak dan broker. *Hiwalah* terjadi pada saat *muhil* membeli ayam kepada *muhal*. Jual beli itu dilakukan oleh *muhil* dan *muhal* dengan sistem DO artinya ayam dikirim terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan kemudian hari, namun dalam praktiknya hutang tersebut dialihkan pada *muhal* ‘*alaih*. Utang (*muhal bih*) yang timbul dari praktik jual beli ayam itu tidak memiliki kesesuaian jumlah dan nominalnya dengan utang yang dimiliki *muhal* ‘*alaih* terhadap *muhil*. Akad tersebut dilakukan hanya atas kesepakatan *muhil* dan *muhal*, *muhal* ‘*alaih* tidak mengetahui kesepakatan *hiwalah* tersebut.
2. *Hiwalah* merupakan suatu akad dalam muamalah yang hukumnya diperbolehkan, dengan syarat terkait rukun dan syarat *hiwalah* harus terpenuhi. *Hiwalah* yang terjadi di Desa Serdang merupakan *hiwalah al-muqayyadah*. Ulama fiki sepakat menyatakan terkait *hiwalah al-*

muqayyadah bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Sedangkan dalam praktiknya utang-utang tersebut tidak memiliki kesamaan, sehingga terdapat pihak yang menerima jumlah lebih dari utang tersebut. Hal itu diketahui dan disebutkan pada awal akad oleh kedua belah pihak saja, sehingga di khawatirkan akan menuju pada transaksi riba. Maka, *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang teradi di Desa Serdang menurut Islam hukumnya adalah tidak sah.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang melakukan praktik *hiwalah* hendaknya selalu berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Melakukannya dengan berlandaskan rasa tolong menolong, jangan melakukan *hiwalah* karena faktor mencari keuntungan. Karena hal tersebut akan menuju pada praktik riba.
2. Untuk mencegah terjadinya resiko dalam praktik *hiwalah*, hendaknya masyarakat jangan menunda-nunda dalam pembayaran utang. Praktik *hiwalah* tidak terjadi dan tidak akan di salah gunakan bila utang piutang tersebut terselesaikan sesuai dengan akad.
3. Mengusahakan bagi masyarakat untuk tidak lagi membiasakan berhutang, yang menimbulkan pengalihan utang (*hiwalah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C. N, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Al-fauzan, Saleh *fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Perss 2005).
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989).
- Azhari Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Perss, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Bandung: Hikmah, 2010.
- Halim Hasan Binjai, Abdul, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: GP Press Group, 2014).
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet. 2016).

Khalaf, A. W. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2015.

----- *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Moeloeng, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001).

Muhammad ath Thayyar, Abdullah bin, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nur, Efa Rodiah, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 Juni 2015.

Raco, J.R *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Jakarta: Alma'arif, 1997.

----- *Fikih Sunnah Jilid 13*, Bandung: Alma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sedamayanti. *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju. 2001).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014).

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. 2014).

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010).

Tika, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008).

W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Waluyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002).

Yaya, Rizal. Dkk, *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat. 2012.

